TINDAK LANJUT LEMBAGA LEGISLATIF ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MEMBATALKAN KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG

Ali Marwan HSB

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara

Jl. Putri Hijau No. 4 Medan Indonesia

E-mail : ali.marwan13@gmail.com

A. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Putusan final Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak membuka peluang bagi upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya. Pengujian undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji secara konstiusionalitas suatu undang-undang, menguji sejauh mana undang-undang yang bersangkutan bersesuai atau bertentangan dengan undang-undang dasar. Manakala Mahkamah Konstitusi memandang suatu undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar maka undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹

Secara hukum, undang-undang yang menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi adalah produk politik, bukan produk hukum. Undang-undang didesain, dirancang dan diajukan oleh Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Pasal 20 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, namun Presiden berhak pula mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.²

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai organ yang mempunyai tugas menguji undang-undang tentu mempunyai korelasi dengan tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai organ pembentuk undang-undang. Di mana Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan bahwa suatu undang-undang atau ketentuan di dalamnya - yang merupakan hasil persetujuan bersama Dewan

Perwakilan Rakyat dan Presiden - bertentangan dengan undang-undang dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tentu hal ini mempunyai konsekuensi logis sehingga dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimasukkan sebagai salah satu materi muatan undang-undang yaitu tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan pembahasan akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masuk di dalam daftar kumulatif terbuka yang pengajuannya bisa sewaktu-waktu tanpa harus terlebih dahulu masuk dalam program legislasi nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas menjadi penting dan menarik dibahas mengenai bagaimana sebenarnya tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang harus dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai lembaga legislatif.

B. Pembahasan

B.1. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislature

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: *Pertama*, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstiusional di tengah masyarakat, *Kedua*, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab, *Ketiga*, di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.³

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sesungguhnya tidak terlepas dari keinginan masyarakat agar pemerintah Indonesia diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip cita

1 M. Laica Marzuki, "Judicial Review di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 1 No. 3 - November 2004, hlm. 2 - 3.

2 M. Laica Marzuki, "Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 3 No. 1 - Maret 2006, hlm. 2.

3 Titik Triwulan Tutik, 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, hlm. 221.

negara hukum. Di mana, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *the rule of law, not of man*, yang sejalan dengan pengertian kekuasaan yang dijalankan oleh hukum.⁴

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berpijak pada 4 (empat) pilar fundamental yakni: *Pertama*, sebagai paham konstitusionalitas yang pada hakekatnya ingin menciptakan terselenggaranya pembatasan kekuasaan secara berimbang oleh penyelenggara negara agar tidak sewenang-wenang, *Kedua*, sebagai instrumen *check and balance* sehingga tercipta saling kontrol. Oleh karena itu kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pelaksanaan *check and balance* agar tidak terjadi *overlapping* dalam pelaksanaan kekuasaan negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Ketiga*, menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih sehingga penyelenggara negara harus memiliki kepekaan terhadap kepentingan rakyat dengan menaati asas-asas penyelenggaraan negara yang baik dan bersih, dan *Keempat*, perlindungan terhadap hak asasi manusia karena kekuasaan yang tidak tersentuh oleh mekanisme kontrol sangat potensial melakukan tindakan sewenang-wenang, oleh karena itu dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi diharapkan melakukan pengawasan secara mandiri dan objektif terhadap penyelenggara negara agar tetap berpijak pada perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.⁵

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945⁶ memberikan prospek yang baik pada penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Artinya pengujian undang-undang sebagai upaya mengidentifikasi, menyelidiki lebih komprehensif dan kemudian menilai secara objektif, akan menghindari atau mencegah undang-undang menyalahi atau menyimpang dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁶ Apalagi produk hukum yang semestinya dibentuk oleh lembaga legislatif, ternyata dalam prosesnya sangat didominasi oleh eksekutif. Hal demikian menjadikan undang-undang dibuat bukan atas dasar keinginan dan kebutuhan masyarakat yang diwakili oleh lembaga

legislatif namun karena pemerintah yang memerlukannya.⁷

Kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang menjalankan 5 (lima) fungsi. Fungsi pertama adalah sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) Fungsi ini sesuai dengan latar belakang keberadaan Mahkamah Konstitusi untuk menjamin pelaksanaan dan penegakan konstitusi dalam penyelenggaraan negara. Fungsi ini mewujudkan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perkara-perkara penting dan mendasar yang terkait dengan isu konstitusi.⁸

Fungsi kedua adalah sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*). Fungsi ini berkaitan erat dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, di mana Mahkamah Konstitusi harus memutuskan bagaimana seharusnya undang-undang dasar ditafsirkan ke dalam undang-undang.⁹ Fungsi ketiga adalah sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*). Fungsi ini berkaitan dengan materi muatan konstitusi yaitu memberikan jaminan terhadap hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus membatalkan ketentuan undang-undang yang jelas-jelas melanggar hak konstitusional warga negara yang diatur di dalam undang-undang dasar. Dan ini berkaitan erat juga dengan fungsi keempat Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai pelindung hak asasi manusia.¹⁰

Fungsi kelima adalah sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*). Fungsi mengawal demokrasi melekat pada wewenang memutus pengujian undang-undang, di mana wewenang pengujian undang-undang menjadi instrumen hukum untuk memastikan bahwa setiap proses pembentukan undang-undang dan materinya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.¹¹

Jika dicermati. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar diarahkan untuk mendudukkan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislature*.¹² Di mana Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai *positive legislature*. Sebagai *negative legislature*, secara teoretik, Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai pengganti kebutuhan kamar lain di lembaga legislatif. Keberadaannya, melakukan

4 Jimly Asshiddiqie, 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Penerbit Setjen Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 69.

5 Tim KRHN, 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dan RUU Mahkamah Konstitusi*, KRHN dan Kemitraan, Jakarta, hlm. 3 - 4.

6 Mustafa Luthi, 2010. *Hukum Sengketa Pemilu pada di Indonesia; Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 19.

7 Sulardi, 2012. *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Setara Press, Malang, hlm. 149 - 150.

8 Janedjri M. Gaffar, 2012. *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 154.

9 *Ibid*, hlm. 154-155.

10 *Ibid*, hlm. 155-156.

11 *Ibid*, hlm. 156.

12 Martitah, 2013. *Mahkamah Konstitusi; Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 175.

purifikasi atas proses dan produk legislasi. Karena itu, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sebagai lembaga kontrol eksternal dalam proses legislasi.¹³ Maka, secara fungsional institusi pengujian yudisial oleh Mahkamah Konstitusi sebagai solusi paling memadai atas isu penyalahgunaan kekuasaan legislasi.¹⁴

B.2. Jenis-Jenis Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur 3 (tiga) jenis amar putusan yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan dan permohonan ditolak.

Permohonan tidak dapat diterima, jika pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat. Hal ini berkaitan dengan *legal standing* dan isi permohonan, di mana pemohon yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang yaitu; (a) perorangan warga negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (c) badan huku publik atau privat, atau (d) lembaga negara. Selain itu, pemohon harus menjelaskan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dinyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
3. Kerugian hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan

5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Permohonan dikabulkan, dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan. Yaitu apabila materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, permohonan dikabulkan jika pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi tidak membuat norma baru dan sifatnya hanya deklaratif atau melalui suatu pernyataan.¹⁵

Permohonan ditolak. Hal ini terjadi dalam hal undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan.

Dalam perkembangannya, terdapat pula amar putusan lainnya dalam praktik di Mahkamah Konstitusi, yaitu (i) konstitusional bersyarat (*conditionally Constitutional*), (ii) Tidak Konstitusional Bersyarat (*unconditionally Constitutional*), (iii) penundaan keberlakuan putusan dan (iv) perumusan norma dalam putusan.¹⁶

Putusan konstitusional bersyarat merupakan putusan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi dengan memberikan persyaratan pemaknaan dan keharusan kepada lembaga negara dalam pelaksanaan suatu ketentuan undang-undang untuk memperhatikan penafsiran Mahkamah Konstitusi atas konstitusionalitas ketentuan undang-undang yang sedang diuji tersebut. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi atau ditafsirkan lain oleh lembaga negara yang melaksanakannya, maka ketentuan undang-undang yang sudah diuji tersebut dapat diajukan untuk diuji kembali oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁷

Kemudian dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi juga mengenalkan model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Putusan model ini hanya

13 Saldi Isra, Kata Sambutan dalam Munafrizal Manan, 2012. *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. vi.

14 Titon Slamet Kurnia, 2015. *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; The Jimly Court 2003 - 2008*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 79.

15 Maruarar Siahaan, 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 205-206.

16 Tim Penyusun, 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 142 - 147.

17 Mahfud MD, Moh., "Problematika Putusan MK yang Bersifat *Positive Legislature*", dalam Martitah, 2013. *Mahkamah Konstitusi; Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. xv.

kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti ketentuan yang dimohonkan untuk diuji dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi. Dengan demikian secara karakteristik, model putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat secara substansial tidak berbeda.¹⁴

Model putusan yang selanjutnya adalah putusan yang pemberlakuanannya ditunda (*limited constitutional*) yang berarti menoleransi berlakunya aturan yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi hingga batas waktu tertentu. Model *limited constitutional* bertujuan untuk memberi ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu tertentu karena didasarkan atas pertimbangan kemanfaatan.¹⁵

Jenis putusan yang selanjutnya adalah model putusan yang merumuskan norma baru yaitu di mana Mahkamah Konstitusi memberikan rumusan baru atas norma yang diuji. Model putusan ini didasarkan suatu keadaan tertentu dan dianggap mendesak untuk segera dilaksanakan. Dengan demikian ada problem implementasi jika putusan Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan suatu norma bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan timbul kekosongan norma sementara norma tersebut sedang, akan, bahkan telah diimplementasikan namun menimbulkan persoalan konstitusional terutama dalam penerapannya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya kemudian merumuskan norma baru untuk mengatasi inkonstitusionalitas penerapan norma tersebut. Rumusan norma baru tersebut pada dasarnya bersifat sementara.¹⁶

B.3.Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi

Upaya menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*, masih mendapatkan tantangan yang cukup besar. Fakta menunjukkan bahwa putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi sering tidak direspon positif oleh organ konstitusi lain. Padahal dalam tahap memutus sengketa hukum, akibat hukum dari putusan pengadilan itu bersifat *res judicata*, artinya putusan tersebut bersifat final, pertama dan terakhir. Jika menurut

istilah dari John V. Orth yaitu *a thing adjudged*, artinya perkara yang sudah diputus final oleh lembaga ini tidak boleh diadili lagi.¹⁷ Konsekuensi dari putusan final ini bahwa semua pihak harus mematuhi perubahan keadaan hukum yang diciptakan melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan mengimplementasikannya. Namun, fakta menunjukkan bahwa putusan final dan mengikuti sering tidak direspon positif oleh organ pembentuk undang-undang sehingga besar kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak implementatif. Selain itu, isi putusannya kerap menimbulkan adanya kesumiran dari kekuatan eksekutorial putusan sebagai akibat kesumiran atura hukum yang mengatur implementasi putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Mahkamah Konstitusi tidak dilengkapi dengan aparat atau organ yang melaksanakan putusan itu secara paksa.¹⁸

Pada dasarnya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tidak memerlukan lembaga eksekutor, sebab putusan *judicial review* sama dengan undang-undang, langsung berlaku begitu dinyatakan dalam lembaran negara. Undang-undang langsung berlaku dan dieksekusi dalam praktik begitu diundangkan tanpa harus ada eksekutor khusus, begitu pula putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁹

Menurut Martitah, bahwa berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi memerlukan dukungan dari kekuatan-kekuatan lain selain hukum dan sanksi-sanksinya. Kekuatan lain yang diperlukan untuk berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi berupa kekuatan sosial, politik serta adanya umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.²⁰

Sedangkan menurut Bachtiar bahwa untuk mewujudkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berwatak implementatif sebagai suatu karakteristik putusan peradilan konstitusi, upaya-upaya yang mendesak untuk dilakukan adalah sebagai berikut:²¹

1. Putusan Mahkamah Konstitusi harus disertai dengan *judicial order* diarahkan kepada perorangan atau institusi negara;
2. Implementasi putusan final memerlukan kerja sama kolaboratif antar lembaga negara;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi idealnya mempertimbangkan kondisi realitas sosial dan psikologi masyarakat; dan
4. Putusan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan pada penafsiran yang sejalan

14 Syukri Asy'ari, dkk, 2013. *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 10-11.

15 *Ibid*, hlm. 11.

16 *Ibid*, hlm. 14.

17 Wicipto Setiadi, 2013. "Dukungan Politik dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2 Nomor 3, Desember 2013, hlm. 300.

18 Bachtiar, 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 18 - 19.

19 Moh. Mahfud MD, "Problematika Putusan MK.....", *Op. Cit.*, hlm. xix - xx.

20 Martitah, 2013. *Mahkamah Konstitusi.....*, *Op. Cit.*, hlm. 249.

21 *Ibid*, hlm. 235 - 254.

dengan politik hukum undang-undang dasar.

Dukungan politik dan kerjasama kolaboratif sangat diperlukan terutama dari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Untuk putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat dan perumusan norma baru ditindaklanjuti melalui pembentukan atau revisi undang-undang²² dengan ketentuan bahwa semua persyaratan dan norma baru yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi diakomodir di dalam revisi undang-undang tersebut.

Untuk putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan dan menyatakan suatu ketentuan dalam undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, pada hakikatnya bersifat *self-executing*. Dalam artian, putusan itu terlaksana dengan sendirinya. Ini terjadi karena norma yang dinegasikan tersebut mempunyai ciri-ciri tertentu yang sedemikian rupa dapat diperlakukan secara otomatis tanpa perubahan atau perubahan undang-undang yang memuat norma yang memuat norma yang diuji dan dinegasikan tersebut ataupun tanpa memerlukan tindak lanjut dalam bentuk perubahan undang-undang yang diuji tersebut.²³

Selain itu, Mahkamah Konstitusi tidak diwajibkan memerintah *de wetgevers* mencabut redaksi ayat, pasal dan/atau undang-undang yang dinyatakan tidak mengikat hukum itu dari undang-undang-nya tetapi dengan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam berita negara, menegaskan hal tidak mengikatnya lagi ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud.²⁴

Tetapi, menurut hemat penulis bahwa pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam berita negara tanpa tindak lanjut dari pembentuk undang-undang saja tidaklah cukup. Hal ini dikarenakan dalam sistem hukum Indonesia yang menjadi sumber hukum utama dan menjadi rujukan adalah peraturan perundang-undangan dengan undang-undang salah satunya dan sering mengabaikan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Supaya daya laku putusan Mahkamah Konstitusi lebih bermakna tetap dibutuhkan tindak lanjut dari pembentuk undang-undang dalam bentuk undang-undang perubahan.

Tindak lanjut dari pembentuk undang-undang atas putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang perubahan harus menghapuskan atau menghilangkan ketentuan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Apabila yang dibatalkan hanya berupa "kata" atau "frasa", maka di dalam

undang-undang perubahan tersebut harus menghilangkan "kata" atau "frasa" tersebut. Sebagai contoh dapat kita perhatikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam putusan tersebut frasa "sampai dengan 1 (satu) tahun" pada Pasal 32 ayat (1) dan frasa "dan ayat (2)" dalam Pasal 32 ayat (3) bertentangan dengan undang-undang dasar. Putusan tersebut ditindak lanjuti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Frasa "sampai dengan 1 (satu) tahun" telah dihapuskan dari ketentuan Pasal 32 ayat (1), di mana bunyi pasal 32 ayat (1) sebelumnya yaitu "Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari **sampai dengan 1 (satu) tahun** sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat". Sedangkan di undang-undang perubahan berbunyi bahwa "Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat". Demikian juga frasa "dan ayat (2)" telah dihapuskan dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) yang semula berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dan ayat (2)** diatur dalam Peraturan Presiden" dan selanjutnya dalam undang-undang perubahan berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden".

Jika yang dibatalkan adalah "butir", "ayat" atau "pasal" di dalam undang-undang, maka dituliskan kata "dihapus" pada undang-undang perubahan. Hal ini dapat juga dilihat pada putusan tentang pengujian Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Salah satu putusannya berbunyi bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) tersebut yang semula berbunyi "Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri" dan pada undang-undang perubahannya ketentuan Pasal 32 ayat (2) tersebut "dihapus".

Hal yang perlu diperhatikan lagi dalam membentuk undang-undang perubahan atas tindak lanjut atas putusan Mahkamah

22 Mohammad Mahrus Ali, dkk, 2014. *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat dan Memuat Norma Baru*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 27.

23 Syukri Asy'ari, dkk, 2013. *Model dan Implementasi.....*, Op. Cit., hlm. 15.

24 M. Laica Marzuki, "Kekuatan Hukum.....", Op. Cit., hlm. 5.

Konstitusi yang membatalkan ketentuan dalam undang-undang yakni bahwa ketentuan yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi seyogianya tidak dicantumkan lagi dalam undang-undang perubahan. Contoh yang bisa diberikan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Salah satu isi putusannya menyatakan bahwa frasa "unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona" pada Pasal 59 ayat (2) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian tindak lanjut dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tetap memasukkan frasa "unit usaha produk hewan" di dalam ketentuan Pasal 59 ayat (2). Pasal 59 ayat (2) pada undang-undang sebelum perubahan berbunyi "Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana mana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari **unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona** dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan". Kemudian dalam undang-undang perubahan berbunyi "Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari **unit usaha produk hewan pada suatu negara** yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan".

Dapat kita perhatikan bahwa frasa yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi masih dimasukkan ke dalam ketentuan di dalam undang-undang perubahan. Hal ini seyogianya tidak dilakukan karena akan mengundang pengujian kembali ke Mahkamah Konstitusi karena sudah diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Perlu diperhatikan juga agar dalam tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-undang tidak memasukkan ketentuan yang secara pengertian sama dengan ketentuan yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini berpotensi akan dibatalkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi jika ada lagi pengujian terhadap ketentuan tersebut.

Kasus seperti ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa "untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.....". Ketentuan sepanjang frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, ketentuan tersebut muncul kembali dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" yang sudah dibatalkan diganti dengan frasa "dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris".

Tindak lanjut seperti ini memberikan peluang bahwa pasal tersebut akan diuji kembali dengan alasan dan dalil yang sama karena bunyi ketentuannya sama tetapi dengan lembaga yang berbeda.

C. Penutup

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi sebagai *the guardian constitution* memiliki peranan untuk mengimbangi atau mengontrol proses legislasi yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi mempunyai kaitan yang erat dengan lembaga legislatif tersebut, maka dalam penerapan putusan-putusannya, Mahkamah Konstitusi memerlukan dukungan terutama dukungan politik dari pembentuk undang-undang.

Dukungan tersebut dapat dilakukan dengan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi melalui pembentukan undang-undang perubahan yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan catatan bahwa undang-undang perubahan yang dibentuk harus menghapuskan ketentuan yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi baik itu "kata", "frasa", "butir", "ayat" atau "pasal" dalam undang-undang. Bukan dengan tetap memasukkan ketentuan yang sudah dibatalkan atau memasukkan ketentuan yang sama secara pengertian dengan ketentuan yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Ali, Mohammad Mahrus., dkk. 2014. *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat dan Memuat Norma Baru*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly., 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*. Jakarta: Setjen Mahkamah Konstitusi.
- Asy'ari, Syukri, dkk., 2013. *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003 - 2012)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Gaffar, Janedjri M., 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kurnia, Titon Slamet., 2015. *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; The Jimly Court 2003 – 2008*. Bandung: Mandar Maju.
- Lutfi, Mustafa., 2010. *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia; Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press.
- Manan, Munafrizal., 2012. *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Mandar Maju.
- Martitah. 2013. *Mahkamah Konstitusi; Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Siahaan, Maruarar., 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulardi. 2012. *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*. Malang: Setara Press.
- Tim KRHN. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dan RUU Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KRHN dan Kemitraan.
- Tim Penyusun. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Tutik, Titik Triwulan., 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Jurnal**
- Marzuki, Laica M., 2004. "Judicial Review di Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 1 No. 3 – November 2004: 1 – 121.
- , 2006. "Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang". *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 3 No.1 – Maret 2006: 1 – 166.
- Setiadi, Wicipto., 2013. "Dukungan Politik dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Rechtsvinding* Volume 2 Nomor 3, Desember 2013: 295 – 451.